

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMEKARAN DESA ADAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4  
TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI**

**I Putu Suriadi**  
Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email: [suriadiiputu@gmail.com](mailto:suriadiiputu@gmail.com)

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali memberikan otonomi terhadap Desa Adat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya dualitas pemerintahan desa di Bali yaitu Desa Administratif (Dinas) dan Desa Adat berpotensi terhadap timbulnya konflik kepentingan yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya pemekaran Desa Adat. Akan tetapi di dalam Perda tersebut tidak mengatur secara tegas tentang pengaturan dan penyelesaian konflik atas pemekaran desa adat. Untuk mengetahui pengaturan dan penyelesaian konflik atas pemekaran desa adat berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019, Perda tersebut tidak mengatur secara tegas tentang kedua hal tersebut di atas.

**Kata Kunci : Dualitas, Pemerintahan Desa, Pemekaran Desa Adat, Penyelesaian Konflik.**

**Juridical review of the traditional village expansion arrangements  
based on bali provincial regulations no.4 year 2019 about  
traditional village in bali**

**I Putu Suriadi**

Faculty of Law

Legal Studies Program

Mahasaraswati Denpasar University

Email: [suriadiiputu@gmail.com](mailto:suriadiiputu@gmail.com)

**ABSTRACT**

Bali Provincial Regulations No. 4 year 2019 concerning traditional village in Bali gives autonomy to traditional villages to manage and organize their own household. With the existence of village governance duality in Bali, in which are Administrative Village and Traditional Village, there is a potential for conflict of interest which is caused by the traditional village expansion. However, the Provincial Regulation No. 4 year 2019 does not explicitly manage the regulation and conflict resolution for the expansion of Traditional Village.

**Keyword: Duality, village government, traditional village expansion, conflict resolution**

UNMAS DENPASAR